

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo)

Oleh :

FERRI NICHOLAS HAMISI

Abstrak

Pembuatan kebijakan merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ditujukan kepada pengembangan etika dan moral partisipasi politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, secara nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat.

Dalam rangka partisipasi politik, kemampuan, kualitas, dan kemandirian berpolitik oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan peranannya secara mantap dalam tatanan kehidupan politik. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Perencanaan adalah tahap yang paling awal dan paling vital dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak (stakeholders) yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan yang beragam.

Dengan kata lain upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah.

Pendahuluan

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik walaupun untuk mewujudkannya sering diperhadapkan dengan berbagai kendala, atau dalam beberapa sistem politik tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mempertahankan eksistensinya, negara juga memandang perlu mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebutuhan dan keinginan para warga negara tersebut demi eksistensi negara itu sendiri. Konsekuensinya, seringkali kita melihat terjadinya benturan-benturan di antara keduanya, yaitu antara kebutuhan dan keinginan masyarakat atau *infra struktur* dengan kebutuhan atau kemauan politik pemerintahannya atau *supra struktur*.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tiap-tiap negara dengan tidak melihat sistem politik yang dianutnya, mempunyai ruang dan pandangan tersendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik setiap warga negara. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara berkesinambungan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan para anggota masyarakat seringkali harus bertabrakan dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan anggota-anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik, dengan suatu ketegasan bahwa kebutuhan para anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang dimilikinya harus disingkirkan.

Dengan keberadaan negara, cara-cara yang bisa dipakai oleh berbagai golongan masyarakat dalam menuntut hak mereka berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah sangat berbeda. Hal itu terjadi karena aktivitas partisipasi politik berkaitan erat dengan partisipasi politik yang dilaksanakan pada suatu daerah. Dengan kata lain, bagaimana bentuk, cara, serta kemungkinan-kemungkinan rakyat dalam memberikan partisipasi terhadap masalah-masalah politik sangat ditentukan oleh sistem politik yang ada. Dari kondisi ini, pendekatan partisipasif merupakan konsep yang harus dikembangkan menetapkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat atau dapat disebut dengan model partisipasi masyarakat. Dasar proses partisipasi masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya

yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka menjadi lebih baik. Proses menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Batten (dalam Ndraha 1990:110) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Proses ini dapat diringkas dengan nama partisipasi. Maka dalam setiap program yang bertujuan menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan dan proses dalam kegiatan tersebut. Karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut.

Maka di dalam setiap pembuatan kebijakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, karena proses perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal yang sangat penting dimana tahap perencana sebagai tahap penentuan keputusan yang akan diambil. Kesalahan dalam perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi perencanaan yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula. Keputusan inilah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maka dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri

Dalam kaitan dengan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan jailolo menunjukkan kecenderungan kurangnya bentuk atau pola partisipasi politik yang demokratis. Bahwa partisipasi politik masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan mempunyai hubungan erat dengan artikulasi-aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang kurang dirasakan oleh masyarakat, adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan pengertian artikulasi aspirasi ini, antara lain dapat

diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau proses pembuatan rencana pembangunan dan secara tidak langsung dimana kebijakan-kebijakan tersebut sudah merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang sedang dirasakan oleh masyarakat.

Konsep Partisipasi politik

. Michael Rush dan Philip Altof (dalam Kartini Kartono, 1983:22) mengemukakan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Merriam Budiardjo (1982:1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Istilah partisipasi politik telah dipergunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpamanya informasi politik, persepsi seorang tentang toleransi, bagi urusannya sendiri suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah).

Jika partisipasi itu perilaku, apakah ia mencakup segala kegiatan yang mempunyai relevansi politik, tetapi didalam essei ini didefinisikan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pada terwujudnya kebijakan itu. (Maurice Duverger, 1981:19).

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Bhattacharyya (dalam Ndraha,1990: 102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, sedangkan Mubyarto (dalam Ndraha,1990: 102) juga menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk

membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Wahyudi Kumorotomo (1999:112-114) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya.

Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam:

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (*citizen government contacting*)
4. Partisipasi warga negara langsung

Begitu juga halnya dengan Soetrisno (dalam Tangkilisan, 2005:320) partisipasi ditempatkan sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai usaha mentransformasikan sistem pembangunan dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha *system maintenance*. Untuk itu, partisipasi seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan.

Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Soehardjo (dalam Tangkilisan 2005:321). Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (*self-reliance*) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Konsep Masyarakat

Pengertian masyarakat sebagai mana dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dengan suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (1999). Menurut Sarjono Soekanto (1998) masyarakat merupakan suatu sistem kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan golongan dan pengawasan tingkhalaku kebiasaan manusia, masyarakat dalam pengertian Ensiklopedia Nasional Indonesia dikemukakan adalah sebagai kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat yang memiliki hubungan timbale balik. Dalam interaksi tersebut

terdapat nilai-nilai social tersebut, yang menjadi pedomanb untuk bertingkh laku sebagai anggota masyarakat sehingga anggota masyarakat biasanya memiliki suatu kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan tertentu, (Ensiklopedia 1990).

Kata masyarakat sebenarnya memiliki pengertian sekumpulan manusia yang disatukan oleh aturan atau adat istiadat tertentu. Didalamnya juga terdapat struktur dan pembagian kerja atau tugas, baik yang suda jelas seperti yang dijumpai pada struktur masyarakat tradisional, pedesaan maupun struktur masyarakat modern di perkotaan.

Menurut Selom Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.jadi dari pengertian ini ,unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut:

- a). Manusia yang hidup bersama
- b). Bercampur untuk waktu yang lama
- c). Mereka sadar bahwa mereka merupakan kesatuan Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sedangkan menurut E.ST Harahap, Menjelaskan bahwa, masyarakat menurut pengertian sehari-hari adalah berasal dari bahasa arab, yaitu masyarakat yang artinya bersama-sama/sebelah-menyebelah dengan kata lain bahwa masyarakat adalah kumpulan bersama.

Demikian pula Hasan Shadily mengatakan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara godaan berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain.

Prof. DR, koentjaraningrat mengatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk hidup manusia yang terikat oleh sistem adat-istiadat tertentu sehingga tercipta suatu kesatuan hidup

Dari pengertian tentang masyarakat yang telah di kemukakan diatas oleh beberapa pakar,dapat disimpulkan bahwa,masyarakat adalah terdiri dari orang-orang yang tidak mutlak atau angka-angka yang pasti berapa jumlah yang harus ada,tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama-sama sampai menghasilkan kebudayaan.

Konsep kebijakan

Secara etimologi kata kebijakan berasal dari kata yang bijak yang dalam kamus bahasa Indonesia (W .J .S. Poerwadarminta, mengartikan : Pandai, mahir, selalu

menggunakan akal budinya. Jadi seseorang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan yang cocok, dengan tujuan yang jelas sebagai sasaran yang akan dijalankan langkah demi langkah.

Kebijakan dalam artian umum adalah mengenai seperangkat buah-buah pikiran, pandangan, pendapat serta langkah-langkah yang ditempuh dan yang tertuang dan terumuskan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, keputusan peraturan, ketentuan ataupun sejenis undang-undang yang ditujukan bagi pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Irfan Islamy,1984:22)

Selanjutnya Amrah Raksasatya yang disetir oleh M. Irfan Islami (1984:24) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan.

Lebih lanjut dikatakan satu tujuan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi. Selain dari definisi tersebut diatas masih banyak lagi definisi yang lain dikemukakan oleh para sarjana namun meskipun banyak definisi yang diberikan tapi pada dasarnya semua mengarah pada satu pengertian, yaitu kebijakan itu sendiri.

Secara umum, istilah kebijakan atau policy untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa. namun kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah analisis menyangkut analisis kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Budi Winarno 2008:16). Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep atau azas yang menjadi garis atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Mostopadidjaja (dalam wicaksono 2006:60) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitan dengan tindakan, kegiatan pemerintah atau serta perilaku Negara pada umumnya dan

kebijakan tersebut di tuangkan dalam berbagai bentuk peraturan contohnya peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya menurut Anderson (dalam Budi Winarno 2008:18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Lebih memperjelas tentang konsep kebijakan, Anderson mengatakan bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatur sesuatu.
4. Kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu

Selanjutnya Mustopadidjaja (dalam Setyawan 2007:35) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun organisasi pelaksana kebijakan, penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Charles O.Jones (dalam Budi Winarno 2008:16) Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipergunakan dengan tujuan (goals) program, keputusan (decision), standart, proposal dan grand design. Namun demikian meskipun kebijakan sedikit abstrak atau dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang. Selanjutnya salah satu definisi kebijakan diberikan oleh Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno 2008:17) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang dipilih oleh pemerintah untuk tidak dilakukan.walaupun batasan yang diberikan ini dianggap benar dan tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dilakukan.

Sofian Efendi (2001) memberikan batasan bahwa kebijakan public adalah semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, yang orang lain tidak mau bertanggung jawab. Jadi kebijakan public merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat yang orang lain tidak mau mengatasinya.

Sebagai suatu kebijakan yang baik, menurut William N. Dunn, harus melalui tahap-tahap kegiatan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agenda setting.
2. Policy formulation.
3. Policy adaptation
4. Policy implementation
5. Policy assessment

Dari tahap-tahap yang paling rumit dan menentukan adalah “policy formulation” yang didalamnya cara memformulasikan alternative-alternatif kebijakan yang mampu memecahkan masalah, memilih alternatif-alternatif memadai dan efektif bila dilaksanakan

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah :

1. Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
2. Pilihan oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan.
3. Tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, yang orang lain tidak dapat mengatasinya.
4. Sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sehingga diharapkan menemukan sesuatu yang menarik dalam proses penelitian. Untuk melengkapi data primer akan dicari data sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan.

Penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan

secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini, menurut Bungin (2004), tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan peranan Dinas Sosial dalam mengawasi program di Desa.

Informannya adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada 4 unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala seksi pembangunan masyarakat desa, Tokoh masyarakat, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum.

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong ciri-ciri umum manusia sebagai unsur dan mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

Pembahasan

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan prosentase orang yang memilih dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Ternyata juga bahwa pendapatan, pendidikan dan status merupakan

faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah.

Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinue dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa presentase partisipasi dalam pemilihan umum sering kali berbeda dengan prosentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik.

Berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi politik masyarakat dan bahwa pengikut sertaannya akan membantu penanganannya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dsb.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan saudara Fredik.T seorang mahasiswa dari desa Akediri Kecamatan Jailolo mengenai keikutsertaan Masyarakat Dalam Partai Politik. *“Keikutsertaan masyarakat dalam partai politiki tidak efektif ini terbukti dengan tidak ada keseriusan masyarakat di desa kami berpartisipasi dalam partai politik itu dikarenakan partisipasi warga hanya bersifat musiman dan lebih cenderung ikut-ikutan”*.

Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini maka penulis mewawancarai seorang Tokoh Masyarakat yang bernama Bapak A. Sandiang. Mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran.” *Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran akhir-akhir ini bisa dibilang tidak berjalan dengan lancar itu disebabkan, masyarakat banyak yang tidak hadir bila desa atau dari kecamatan sedang mengadakan musyawarah. Alasannya percuma ikut musyawarah kalau akhirnya bukan keputusan masyarakat yang ditindak lanjuti melainkan keputusan pemerintah jadi apa yang diharapkan masyarakat dihiraukan. contohnya masyarakat meminta adanya pembangunan bak penampung air, dari desa malah membangun jalan setapak.*

Belum ada definisi partisipasi politik yang memusatkan dan mencakup seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan. Adalah kurang

tepat untuk memulai dari beberapa batasan pemikiran opriori yang dapat mewakili intisari dari partisipasi politik, akhirnya mereka tiba pada suatu kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam pembangunan yang disebut sebagai “development participation”, sebagai berikut :

1. Keterlibatan rakyat di dalam proses pembuatan keputusan.
2. Keterlibatan dalam implementasi dari program-program.
3. Keterlibatan dalam benefits dan evaluasi dari setiap program.

Sesuai dengan strategi pembangunan nasional, antara lain masyarakat perlu diberi pengetahuan politik dalam hal ini adalah pemberian pendidikan politik adalah suatu kenyataan setiap Masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada saat tertentu.

Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pembekalan selain berupa bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis, yang harus dimulai sejak kecil baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, juga melalui kursus-kursus dan lokakarya. Dengan rangkaian usaha ini pada hakekatnya adalah dalam rangka proses peralihan dari pelestarian nilai-nilai Pancasila.

Namun yang penting dalam pembekalan ini adalah adanya kesadaran, kemauan dan tekad dari masyarakat untuk berani maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.

Dengan demikian, pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing, menjunjung tinggi hukum, agama, luhur budinya. Ini karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat.

Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.

Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak ICKSAN.M.T ALI .SIP selaku Camat Kecamatan Jailolo mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik.”*Pendidikan politik itu sangat berpengaruh sekali terhadap partisipasi politik itu dikarenakan apabila masyarakat mendapat pendidikan politik otomatis masyarakat lebih mengerti dan paham bagaimana berpolitik yang baik .*

Dengan demikian, pendidikan politik dapat menumbuhkan semangat di dalam Masyarakat, dengan berbagai cara antara lain: ceramah tentang contoh teladan dari para Tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa cara lain seperti:

1. Bahan-bahan bacaan dari surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran-siaran radio maupun televisi.
3. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat itu, apakah itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.

Dari kegiatan memang sangat diharapkan pendidikan politik benar-benar dilaksanakan agar benar-benar masyarakat khususnya generasi muda lebih aktif. Berbicara tentang pendidikan politik yang paling dominan adalah ideologi Pancasila yang diartikan sebagai cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan disegala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi Pancasila secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman mencapai cita-cita, dasar-dasar dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari (M. Djadijono, 1985:75).

Selanjutnya untuk dapat mengetahui perlunya ideologi bagi suatu bangsa dalam hidup bernegara terlebih dahulu di jelaskan fungsi ideologi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hidup suatu bangsa yang beraneka ragam, ideologi berfungsi sebagai dasar atau kerangka bagi kehidupan bersama, juga sebagai pemberi arah

tujuan terhadap pemikiran dan kegiatan bersama dari suatu unsur yang ada dalam suatu masyarakat negara. Oleh karenanya, negara sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat nasional hanya akan dapat dikemudikan secara terarah dan efisien apabila ada gambaran yang jelas mengenai hakekat, tujuan dan susunannya (K. Dipoyudo, 1979,9).

Melihat fungsi ideologi seperti terurai di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa gambaran mengenai hakekat, tujuan dasar dan susunan suatu negara itu terkristalisasi dalam bentuk ideologi, dan ideologi itu adalah yang bersifat nasional. Dengan demikian ideologi nasional sangat penting artinya bagi kehidupan suatu bangsa dalam hidup bernegara ataupun masyarakat. Tanpa ideologi nasional, kehidupan bangsa yang bersangkutan akan terombang-ambing, sebaliknya dengan ideologi nasional bangsa yang bersangkutan akan kokoh kuat karena memiliki tujuan yang jelas (R. Hamarung, 1980:88).

Sebagaimana telah disepakati bersama bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, maka Pancasila disamping itu juga merupakan ideologi atau pandangan hidup bersama yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan pantulan kepribadian bersama, karena Pancasila memberi corak dan ciri khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain.

Pancasila adalah kesadaran dan cita-cita moral yang berupa di dalam kebudayaan Indonesia, Pancasila adalah jiwa Bangsa Indonesia, karena itu Pancasila menuntut dari kita semua untuk memelihara dan mengembangkan sikap seimbang, selaras dan serasi dalam kehidupan. Semangat seperti itu pula diharapkan hendaknya menjwai dan mewarisi pemikiran dan kegiatan dalam menterjemahkan Pancasila dalam seluruh perikehidupan bangsa Indonesia baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan sehingga dengan demikian akan terwujud suatu masyarakat Pancasila yang merupakan salah satu dari sekian banyak pokok-pokok Ideologi Nasional Pancasila.

Adapun masyarakat yang demikian ialah suatu masyarakat yang berada, dimana dalam pergaulan sehari-hari sesama anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati dan saling menghargai, bantu membantu, tolong menolong, mengetahui akan hak dan kewajiban masing-masing, menunjang akan hukum yang berlaku serta seluruh masyarakat dapat merasakan hidup yang penuh kedamaian dan keamanan material dan spiritual. Mengingat dalam masyarakat

Pancasila adalah di dukung dengan moral yang jujur dan baik, yaitu moral Pancasila itu sendiri, dimana tingkah laku lahiriah manusia-manusia individu dalam masyarakat didasarkan atas Pancasila.

Secara ilustratif, maka dapat digambarkan bahwa masyarakat Pancasila ialah suatu masyarakat dimana tegaknya Demokrasi, tegaknya Undang-undang, tegaknya keadilan, tegaknya hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan yang erat yang sudah terlaksana sebaik mungkin.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Jailolo Bapak MISPAN DO .LUTFI mengenai pengaruh budaya politik terhadap tingkat partisipasi politik.

“bicara pengaruh budaya politik terhadap tingkat partisipasi politik dikecamatan jailolo itu sangat penting dan berpengaruh sekali.karena dilihat dari beberapa hasil pemilihan kepala desa Akediri,Tedeng,soekonora,bukumatiti guemaadu,dan jalan baru,kepala desa terpilih adalah kepala desa yang mempunyai keluarga besar didesa tersebut”

Berbicara mengenai Budaya, tidak terlepas kaitannya dengan sikap mental dari pada masyarakat itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dimana untuk membentuk suatu kebiasaan tentulah harus dilihat pula karakter dari pada individu, sampai pada masyarakat.

Budaya politik dapat dilihat dari adanya ikatan primodialisme, dan dapat didefinisikan sebagai hubungan Kekerabatan yang erat berdasarkan garis keturunan yang dimaksud yaitu: keturunan yang berasal dari keluarga: ibu, bapak, kakek, nenek, dan moyang yang semuanya terhimpun menjadi suatu masyarakat yang besar dalam suatu wilayah Sehingga, dalam kehidupan masyarakat nampak adanya suatu kerjasama, sikap sosial yang tinggi untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan politik.

Model budaya semacam di atas telah ada pada masyarakat yang ada di Kecamatan Jailolo semenjak dulu, dan keturunan ini telah ada dalam masyarakat, dimana telah dibentuk kerukunan-kerukunan keluarga baik yang berskala kecil (keluarga berdasarkan marga) maupun keluarga yang berskala besar yang semuanya terhimpun dalam suatu masyarakat.

Peningkatan partisipasi politik bagi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum dipengaruhi oleh budaya politik atau ikatan primodal yang kuat serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ada tokoh politik yang

merupakan figur dalam partai politik secara otomatis dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan politik kepada partai politik yang dipimpin, yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat kepada pemimpin mereka dapat mendorong untuk mendukung pemimpin mereka baik di kecamatan dan ditingkat yang lebih tinggi. Karena ada harapan kalau dukungan masyarakat tersebut berhasil atau menang maka nasib masyarakat dapat lebih diperhatikan.

Penutup

A . Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi politik secara aktif bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan politik serta sosialisai politik kepada masyarakat.
2. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya dalam berbentuk pemikiran dan ide-ide, tetapi lebih di tekankan kepada bentuk konkrit untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini camat sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat camat dapat dirasakan menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat.
3. Selain partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan camat, maka sebaliknya pula, dimana kebijakan camat dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, oleh karenanya kedua hal ini harus dapat berjalan sering agar dapat tercipta suatu keseimbangan.

B. Saran

1. Mengingat kurangnya partisipasi politik masyarakat yang ada di kecamatan Jailolo, maka Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini camat harus dapat melihat secara jeli, untuk meningkatkannya, sehingga nantinya diharapkan dalam jangka waktu kedepan, proses pembuatan kebijakan camat dapat lebih efektif dan efisien lagi, sehingga menuju kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Jailolo.

2. Di Kecamatan Jailolo terkesan pemerintah tidak terlalu memperhatikan pendapat, ide-ide pemikiran dari masyarakat, oleh karena itu diharapkan kiranya pemerintah setempat dapat menyerap aspirasi dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Rush, Michael dan Philip Altfelt, *Pengantar Sosiologi Politik*, CV. Rajawali Jakarta.
- Persada Nistrasi Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Admiegara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan & Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Irfan Islamy, 1984. *Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara*, Aksara Baru. Jakarta.
- Budiadjo Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____, 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Winarno, Budi 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, media pressindo, Yogyakarta.
- Effendy, Sofian, 2001. *Bahan Kuliah Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. MAP Universitas Gaja Mada, Yogyakarta
- Sugiyono. Prof. Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta ; Bandung
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1998, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: CV. Masagung.